

**ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
PADA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI
PERBENDAHARAAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA TERAPAN
DALAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Disusun Oleh:

**NAMA : MILA KARINA
NPM : 1833030215
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2021**

POLITEKNIK STIA-LAN

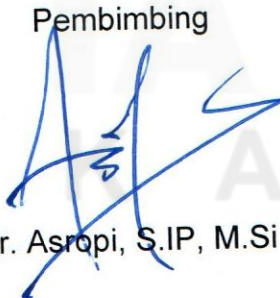
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : MILA KARINA
NPM : 1833030215
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER
PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 1 November 2021

Pembimbing


Dr. Asropi, S.IP, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA-LAN di Jakarta pada 4 November 2021

TIM PENGUJI

Ketua merangkap anggota,



Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si

Sekretaris merangkap anggota,



Faza Dhora Nailufar, S.IP, M.IP

Anggota,



Dr. Asropi, S.IP, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mila Karina

NPM : 1833030215

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul "*Analisis Pengembangan Karier Pegawai Pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA-LAN.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 1 November 2021



Penulis

Mila Karina

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pengembangan Karier Pegawai Pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengembangan karier pada jabatan fungsional pranata komputer saat ini serta permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat SITP. Pada akhir penelitian penulis berharap dapat memberikan saran perbaikan berdasarkan teori-teori terkait pengembangan karier dalam rumpun ilmu manajemen sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pengembangan karier fungsional pranata komputer kedepannya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak dalam proses penyusunan sampai dengan penyelesaiannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta dosen dan staf Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Asropi, S.IP, M.SI selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;

3. Seluruh *key informant* penelitian ini yang telah memberikan informasi penting dalam penulisan skripsi;
4. Mama tersayang yang dengan kebaikan hatinya selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis;
5. Guntur Kharisma Putra, suamiku, yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA-LAN Jakarta dan Direktorat SITP yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan proposal penelitian ini masih terdapat kekurangan. Namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 1 November 2021

Penulis

Mila Karina

ABSTRAK

Mila Karina, 1833030215

ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Skripsi, xv hlm., 98 halaman.

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) adalah unit Eselon II dibawah DJPb, Kementerian Keuangan RI, yang memiliki jumlah pegawai jabatan fungsional pranata komputer terbanyak di lingkungan DJPb. Atas hal tersebut, dibutuhkan pengelolaan pengembangan karier yang optimal dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan karier pranata komputer di Direktorat SITP jika ditinjau dari 4 aspek, yaitu aspek kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan atas suatu jabatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan karier jika ditinjau dari 4 aspek tersebut belum semuanya memiliki kondisi ideal. Penulis menyarankan: 1) Aspek Kualifikasi: agar proses pengumpulan berkas persyaratan pengangkatan jabatan dilakukan secara digital; 2) Aspek Kompetensi: Subbagian Tata Usaha Direktorat SITP membuat *Training Need Analysis* (TNA) setiap tahunnya; 3) Aspek Penilaian Kinerja: Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus segera disusun sesuai format pada SE-10/MK.1/2021; 4) Aspek Kebutuhan Atas Suatu Jabatan: penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah dapat terselesaikan di akhir tahun 2021 untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada para pranata komputer.

Kata kunci: Analisis Pengembangan Karier, Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

ABSTRACT

Mila Karina, 1833030215

CAREER DEVELOPMENT ANALYSIS OF THE EMPLOYEE IN COMPUTER SERVICE FUNCTIONAL POSITIONS IN DIRECTORATE OF INFORMATION SYSTEM AND TREASURY TECHNOLOGY

Essay, xv pages., 98 pages.

The Directorate of Treasury Information Systems and Technology (SITP) is an Echelon II unit under DJPb, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, which has the highest number of computer administrator functional positions within DJPb. Optimal career development management which is in line with applicable regulations is highly needed. The purpose of this study was to find out how the career development process for computer administrators at SITP is viewed from 4 aspects; aspects of qualification, competence, performance appraisal, and the need for a position. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study concluded that not all of these 4 aspects of career development have ideal conditions. The author recommends: 1) Qualification Aspects: the process of collecting documents for appointment requirements is done digitally; 2) Competency Aspect: Administrative Subdivision of the SITP Directorate makes a Training Need Analysis (TNA) every year; 3) Performance Assessment Aspect: Preparation of Employee Performance Targets (SKP) must be immediately prepared according to the format in SE-10/MK.1/2021; 4) Aspects of the Need for a Position: the preparation of job analysis documents and workload analysis can be completed at the end of 2021 for further socialization to computer administrators.

Keywords: Career Development Analysis, Functional Position of Computer Institutions, Directorate of Information Systems and Treasury Technology, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I – PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II – KERANGKA TEORI	14
A. Tinjauan Teori	14
B. Konsep Kunci	35
C. Model Berpikir	38
D. Pertanyaan Penelitian	40
BAB III – METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Tinjauan Teori	41
B. Teknik Pengumpulan Data	41
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	47
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data	47
BAB IV – HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Direktorat SITP	49
B. Analisis Hasil Penelitian	52
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	SEBARAN LOKASI PENEMPATAN PEGAWAI FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUP DJPB TAHUN 2021	5
2.	KOMPOSISI PNS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI DIREKTORAT SITP BERDASARKAN JALUR PENGANGKATAN	9
3.	DAFTAR KEY INFORMANT PENELITIAN.....	43

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	RUANG LINGKUP IT BLUEPRINT DJPb TAHUN 2018 - 2023	2
2.	DIAGRAM MODEL BERPIKIR	39
3.	STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN	52
4.	DAFTAR USULAN KEBUTUHAN PELATIHAN YANG DISETUJUI UNTUK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKTORAT SITP	65
5.	DOKUMEN RANCANGAN URAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI DIREKTORAT SITP	66
6.	CONTOH RANCANGAN BUTIR KEGIATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA DIREKTORAT SITP	74
7.	FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) JABATAN FUNGSIONAL SESUAI LAMPIRAN SE-10/MK.1/2021	74
8.	FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KONDISI SAAT INI	77
9.	FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KONDISI SAAT INI	87
10.	CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	80
11.	CONTOH RANCANGAN FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) SESUAI LAMPIRAN SE-10/MK.1/2021	81
12.	RANCANGAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DIREKTORAT SITP	85
13.	RANCANGAN MODEL DIGITALISASI PEMBERKASAN CALON PRANATA KOMPUTER DI DIREKTORAT SITP	94
14.	CONTOH MODEL TRAINING NEED ANALYSIS (TNA)	95

DAFTAR SINGKATAN

DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BLU	: Badan Layanan Umum
TI	: Teknologi Informasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Direktorat SITP	: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
PERMENPAN-RB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
SILSDM	: Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
PUSINTEK	: Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
DUPAK	: Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
AKK	: Angka Kredit Kumulatif
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
AKK	: Angka Kredit Kumulatif

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Penelitian

Digitalisasi sistem pemerintahan (*digital government*) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam pelaksanaan proses bisnis di internal pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan mulai diterapkan oleh berbagai instansi pemerintahan, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

DJPb merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018, DJPb mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-627/PB/2018 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi (*IT Blueprint*) Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Tahun 2018 s.d. 2023. Tujuan dirumuskannya Kepdirjen ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan rencana strategis DJPb di bidang teknologi informasi dalam kurun waktu enam tahun.

Pada Kepdirjen nomor KEP-627/PB/2018, disebutkan bahwa visi *blueprint* TI DJPb untuk enam tahun kedepan adalah:

Sebagai pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia melalui transformasi *digital* dan optimalisasi teknologi pintar dengan menekankan terbangunnya sistem informasi yang *agile* yang memiliki interoperabilitas tinggi, ketersediaan layanan pengguna yang responsif dan modern ditunjang dengan kepemilikan infrastruktur TIK yang handal serta dukungan organisasi dan sumber daya yang kompeten *sustainable*.

Untuk dapat mewujudkan visi pada *blueprint* TI DJPb diatas diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang juga memiliki kompetensi dalam bidang TI karena suatu sistem TI tidak dapat berjalan dengan optimal jika tidak didukung dengan kesiapan SDM yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang TI. Penguatan kemampuan SDM di bidang TI merupakan sebuah keharusan, karena hal tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan proses transformasi digital di lingkup DJPb. SDM TI merupakan salah satu bagian dari empat ruang lingkup pendukung kesuksesan pengelolaan TI dalam cetak biru DJPb yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1:
RUANG LINGKUP IT BLUEPRINT DJPb TAHUN 2018 - 2023



Sumber: Dokumen IT Blueprint DJPb Tahun 2018

Organisasi dan SDM TI menjadi salah fokus dalam ruang lingkup cetak biru DJPb tahun 2018 s.d. 2023. DJPb berharap dapat siap menghadapi perkembangan era digital dan terus menerus tersedia dalam berbagai peran teknis maupun non teknis (*sustainable*), baik dari sisi organisasi maupun SDM. Salah satu bentuk optimaslisasi organisasi dan SDM TI yang dilakukan DJPb adalah memetakan pegawai-pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang TI, baik yang memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal, untuk selanjutnya diangkat menjadi pejabat fungsional pranata komputer. Hal ini bertujuan agar para SDM TI tersebut dapat memiliki pengembangan karier dan kompetensi yang lebih terarah sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan motivasi dalam bekerja. Pengangkatan SDM TI ke jabatan fungsional pranata komputer juga diharapkan dapat membantu mempercepat proses inisiasi teknologi informasi dan transformasi digital DJPb.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 13 menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan fungsional menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2014 memiliki arti “sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.” Jabatan fungsional pranata komputer dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PERMENPAN-RB) Nomor 32 Tahun 2020.

Pengertian jabatan fungsional pranata komputer menurut Pasal 1

PERMENPAN-RB No. 32 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan fungsional pranata komputer merupakan jabatan karier yang ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Pegawai dengan status jabatan fungsional pranata komputer selanjutnya akan diberikan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.

Pengangkatan pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan DJPb tentunya dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek formasi kebutuhan SDM sesuai dengan lokasi penempatan dan analisis beban kerja. Selain itu, pengangkatan pejabat fungsional pranata komputer juga didasarkan pada minat, kompetensi/keahlian, jenjang pendidikan, maupun masa kerja golongan. Pengangkatan PNS menjadi pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan DJPb dilakukan melalui jalur pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi yang proses dan persyaratannya mengacu pada pasal 14 s.d. 19 PERMENPAN-RB No. 32 Tahun 2020.

Saat ini DJPb memiliki 80 orang pegawai yang berstatus aktif pada jabatan fungsional pranata komputer. Adapun sebaran lokasi penempatan SDM fungsional pranata komputer di lingkup DJPb saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
SEBARAN LOKASI PENEMPATAN PEGAWAI FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER DI LINGKUP DJPB TAHUN 2021

No.	Jumlah Fungsional Pranata Komputer	Lokasi Penempatan
1.	3 orang	Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perbendaharaan
2.	1 orang	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN)
3.	1 orang	Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA)
4.	75 orang	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP)
	80 orang	

*Sumber: Data Sebaran Daftar Pegawai Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) DJPb*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa fungsional pranata komputer tersebar pada empat lokasi yang merupakan kantor direktorat (Eselon II) DJPb di Jakarta dan saat ini tidak ada pranata komputer yang menempati kantor vertikal DJPb. Hal tersebut dikarenakan saat ini semua pengelolaan TI baik dari sisi pengembangan sampai dengan pemeliharaan dilakukan secara terpusat. Lokasi penempatan fungsional pranata komputer terbanyak ada pada Direktorat SITP dengan jumlah 75 orang.

Direktorat SITP adalah salah satu unit Eselon II yang di DJPb yang didirikan pada tahun 2015. Direktorat SITP memiliki tugas merumuskan

kebijakan dan strategi, merancang, menyiapkan, mengembangkan, serta melakukan uji coba proses bisnis dan teknologi informasi perbendaharaan. Direktorat SITP memiliki berbagai infrastruktur yang dapat menunjang tugas dan fungsi di bidang TI, seperti *server database*, jaringan infrastruktur internet yang memadai, perangkat keras dan lunak dengan spesifikasi yang dibutuhkan, serta SDM yang memiliki keahlian di bidang TI.

Berdasarkan data di akhir tahun 2018, Direktorat SITP memiliki 30 orang pegawai dengan status jabatan fungsional pranata komputer dari total 155 orang PNS pelaksana. Adapun 30 orang tersebut berasal dari penerimaan reguler maupun *inpassing* jabatan fungsional pranata komputer yang dibuka oleh Direktorat SITP sejak tahun 2015 dengan status pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengembangan aplikasi, komunikasi, dan layanan informasi di lingkungan Direktorat SITP, maka peran dan kebutuhan atas jabatan fungsional pranata komputer dinilai sangat signifikan dalam membantu penyelesaian tugas. Sebagian besar pelaksana di Direktorat SITP juga memiliki keahlian di bidang TI, baik dari sisi pendidikan formal maupun informal, dan melaksanakan tugas harian yang bersinggungan dengan TI sehingga menjadi fungsional pranata komputer dirasa lebih menguntungkan dari sisi pengembangan karier, kompetensi, serta kemajuan organisasi.

Sejak tahun 2019, Direktorat SITP bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan program penyesuaian/*inpassing* untuk jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 3 kali. Pelaksanaan *inpassing* secara umum diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (PERKA-BPS) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Melalui Penyesuaian/*Inpassing*. *Inpassing* menurut Pasal 1 PERKA-BPS No. 27 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian jabatan PNS non Pranata Komputer menjadi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan dan keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Adapun pelaksanaan *inpassing* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atas kekurangan jumlah fungsional pranata komputer yang sebelumnya telah tersedia dari jalur perpindahan jabatan reguler. Selain itu *inpassing* juga bertujuan untuk memudahkan para SDM TI yang ingin menduduki jabatan fungsional pranata komputer. *Inpassing* juga merupakan bentuk pemenuhan amanat dari Presiden Joko Widodo terkait program *delayering*, yaitu optimalisasi jabatan fungsional pada institusi pemerintahan dengan memangkas jumlah formasi Eselon IV dan III dan memperbanyak komposisi jabatan fungsional.

Waktu pelaksanaan *inpassing* sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 42 Tahun 2018 dilaksanakan terbatas sejak diberlakukannya peraturan sampai dengan tanggal 6 April 2021. Adapun jenjang yang dibuka dalam penawaran *inpassing* jabatan fungsional pranata komputer adalah sebagai berikut:

1. Pranata komputer terampil (Gol. IIb s.d. IIIc), yaitu pranata komputer dengan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang komputer. Secara jenjang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari pranata komputer terampil, pranata komputer mahir, dan pranata komputer penyelia.
2. Pranata komputer ahli (Gol. IIIa s.d. IVe), yaitu pranata komputer dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang komputer. Secara jenjang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari pranata komputer pertama, pranata komputer muda, pranata komputer madya, dan pranata komputer utama.

Tata cara dan persyaratan pelaksanaan *inpassing* secara umum diatur dalam pasal 4 s.d. 9 PERMENPAN-RB No. 42 Tahun 2018 dan secara khusus bagi jabatan fungsional pranata komputer diatur dalam lampiran PERKA-BPS No. 27 Tahun 2017 yang seharusnya dilakukan dengan

tetap memperhatikan komposisi kebutuhan formasi dan beban kerja organisasi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia (SILSDM) DJPb terkait statistik pegawai jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat SITP jika diklasifikasikan menurut jabatan dan jalur pengangkatan, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 2:
KOMPOSISI PNS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DI DIREKTORAT SITP BERDASARKAN JALUR PENGANGKATAN

No.	Jabatan Fungsional (tertinggi – terendah)	Jumlah	Jalur Pengangkatan
Pranata komputer jenjang ahli			
1.	Pranata komputer madya	2	<i>inpassing</i>
2.	Pranata komputer muda	9	5 reguler, 4 <i>inpassing</i>
3.	Pranata komputer pertama	48	16 reguler, 32 <i>inpassing</i>
Pranata komputer jenjang terampil			
4.	Pranata komputer penyelia	1	<i>inpassing</i>
5.	Pranata komputer mahir	7	2 reguler, 5 <i>inpassing</i>
6.	Pranata komputer terampil	8	2 reguler, 6 <i>inpassing</i>
		75	25 reguler, 50 <i>inpassing</i>

Sumber: Data Pengangkatan Pranata Komputer pada SILSDM DJPb (diolah)

Atas data pada tabel diatas, penulis tertarik untuk menggali informasi lebih dalam terkait kondisi pengembangan karier pada jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat SITP untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengembangan karier pada jabatan fungsional pranata komputer sudah sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan observasi penulis, ditemukan beberapa permasalahan terkait kondisi pengembangan karier pegawai jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP yaitu sebagai berikut:

1. Persebaran formasi jumlah pranata komputer yang tidak merata. Misalnya, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fungsional pranata komputer ahli pertama sangat banyak jika dibandingkan dengan formasi pranata komputer ahli madya, muda, dan terampil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang melatarbelakangi perhitungan formasi pegawai tersebut serta apakah pembagian beban kerja sudah merata dan sesuai dengan spesifikasi jabatannya jika dilihat dari kondisi formasi pranata komputer saat ini.
2. Dari 48 orang pegawai fungsional pranata komputer di jenjang ahli pertama, 4 orang diantaranya telah memiliki masa kerja golongan lebih dari 5 tahun yang idealnya sudah dapat dilakukan kenaikan pangkat/jabatan. Namun sampai saat ini 4 orang tersebut belum pernah mengalami promosi pangkat/jabatan (stagnan) dikarenakan tidak memenuhi syarat Angka Kredit Kumulatif (AKK) yang ditetapkan. Padahal jika ditinjau dari PERMENPAN-RB Nomor 32 Tahun 2020,

kenaikkan pangkat/jabatan untuk pranata komputer bisa terjadi lebih cepat (kurang dari 4 tahun) atau setidaknya sama dengan kenaikan pangkat/jabatan bagi pelaksana atau pejabat struktural (dalam waktu 4 tahun)

3. Penilaian kinerja bagi pegawai jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP masih melalui dua tahapan berbeda. Penilaian Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dilakukan berdasarkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan. Penilaian atas perolehan/pemenuhan angka kredit dilakukan berdasarkan pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang akan dinilai pada sidang pleno tahunan. Idealnya penilaian cukup dilakukan sekali saja.
4. Sedikitnya frekuensi maupun kuota pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi untuk masing-masing level jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP. Padahal, pelatihan sangat dibutuhkan sebagai salah satu alat pengembangan kompetensi dan mempermudah dalam pengerjaan tugas harian.

Jika dilihat dari paparan diatas, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat SITP. Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengembangan Karier Pegawai pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan**

Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

B. Fokus Permasalahan

Dalam pelaksanaannya, kondisi pengembangan karier bagi pegawai pada jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP belum sepenuhnya ideal. Masih terdapat permasalahan dan hambatan dalam pengembangan karier berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengembangan Karier Pegawai pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi dan strategi pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional pranata komputer di Direktorat SITP saat ini serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam bidang manajemen sumber daya manusia aparatur, khususnya terkait pengembangan karier pegawai, serta dapat digunakan sebagai literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat bagi dunia praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, maupun rekomendasi berupa perbaikan kepada Direktorat SITP dalam pelaksanaan pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional pranata komputer sehingga kedepannya pengembangan karier dapat menjadi lebih optimal.